

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi merupakan suatu istilah yang mulai populer di Indonesia sejak adanya Ketetapan MPR, yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004), dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Manfaat lainnya adalah memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Adanya otonomi daerah ini juga membuat pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya. Sehingga, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya secara bijak untuk kepentingan masyarakatnya.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya desentralisasi ini jelas mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan penerimaan daerahnya dengan mencari sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah sehingga akan dapat meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri. Penerimaan daerah sendiri dapat berasal dari pajak maupun retribusi.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, bahkan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Walaupun demikian, terkadang realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah tersebut tidak mencapai target yang telah dianggarkan. Berikut daftar anggaran dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dalam lima tahun terakhir:

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi PAD Kota Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2005	213.100.251.482,00	225.596.438.613,00
2006	238.305.532.000,00	253.882.919.542,87
2007	281.981.582.738,93	287.249.534.044,93
2008	338.736.369.006,00	314.627.155.412,30
2009	369.137.442.213,08	360.152.627.690,00

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandung (tahun 2010)

Berdasarkan tabel 1.1 nampak bahwa pada tahun 2008 dan 2009 tidak dapat mencapai anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan tiga tahun lainnya dapat mencapai anggaran. Pada tahun 2008 telah ditetapkan anggaran untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebesar Rp 338.736.369.006,00 namun realisasi yang tercapai hanyalah sebesar Rp314.627.155.412,30 atau sebesar 92,98%, ini menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp 23.749.213.593,70 yang tidak mencapai target, begitupun terjadi pada tahun 2009, dari Rp369.137.442.213,08 hanya terealisasi sebesar Rp 360.152.627.690,00, jadi terdapat Rp8.984.814.523,08 yang tidak tercapai. Jika PAD Kota Bandung ini tidak dapat mencapai target, maka tentu pembangunan yang telah direncanakan pun akan terhambat pula.

Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah

yang sah lainnya. Salah satu retribusi daerah yang berperan dalam besarnya Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi parkir.

Menurut Acuviarta Kartabi (<http://bataviase.co.id>), berdasarkan data tahun 2009, pendapatan retribusi parkir mencapai Rp 4,5 M. Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan di Kota Bandung terdapat 181 titik parkir dengan ruas jalan 227 kilometer dan petugas parkir sebanyak 1.800 orang. Setiap hari uang retribusi yang terkumpul sekitar Rp 15 juta. Namun, pada hari Sabtu justru turun menjadi Rp 10 juta dan Minggu Rp 4 juta.

Dari data ini cukup memberikan pertanyaan, mengapa pada hari libur justru uang yang terkumpul dari retribusi parkir justru turun, padahal pada hari-hari libur terlihat bahwa Kota Bandung dibanjiri wisatawan dari luar kota. Pada hari Sabtu dan Minggu kendaraan-kendaraan pengunjung dari luar Kota Bandung semakin memadati jalan Kota Bandung yang tentunya akan memadati lahan parkir di areal-areal perbelanjaan Kota Bandung. Dengan banyaknya wisatawan dari luar Kota Bandung diperkirakan uang yang terkumpul dari retribusi parkir harusnya lebih tinggi daripada hari-hari kerja biasa.

Selain itu, Acuviarta Kartabi juga menambahkan bahwa potensi retribusi parkir di Kota Bandung, bisa mencapai Rp 104 miliar per tahun jika dikelola dengan baik. Asumsi ini didasari dari jumlah kendaraan roda empat yang masuk melalui 5 pintu tol utama yakni Tol Buah Batu, Pasteur, Kopo, Pasir Koja dan M Toha mendekati angka 28,9 juta pertahun. Belum ditambah dengan kendaraan roda dua yang mencapai 70 %.

Kajian mengenai potensi retribusi parkir juga dilakukan oleh beberapa pihak swasta (<http://handrihandriansyah.wordpress.com>), yang menyebutkan potensi parkir dihitung dengan asumsi hanya 30% dari jumlah kendaraan tercatat dan dalam sehari hanya dianggap sekali parkir. Maka, penerimaan retribusi parkir tiap hari mencapai Rp 162,1 juta per hari. Jika diasumsikan terjadi kebocoran hingga 55 persen, maka penerimaan per hari mencapai Rp 73 juta (sekira Rp 26,2 miliar per tahun). Berdasarkan uji petik secara acak, di dalam kajian itu, potensi jalan di Kota Bandung baru 57 persen yang termanfaatkan. Pengujian yang dilakukan pada 139 ruas jalan, didapatkan penerimaan rata-rata per hari mencapai angka Rp 54,8 juta. Kajian tersebut menyimpulkan, prediksi kasar penerimaan retribusi parkir dengan memperhatikan potensi ruas jalan maupun jumlah kendaraan mempunyai kisaran peluang terkecil sebesar Rp 15,5 miliar per tahun dan peluang terbesarnya mencapai Rp 26, 2 miliar per tahun.

Hasil kajian ini berbeda jauh dengan capaian retribusi parkir Pemkot Bandung selama ini. Target yang ditetapkan pemerintah, ternyata, jauh di bawah potensi sesungguhnya. Bahkan, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung juga tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung berikut target dan realisasi penerimaan retribusi Kota Bandung selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir
Tahun 2006-2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi			
		Jumlah (Rp)	%	Selisih (Rp)	%
2006	4.400.000.000	4.228.718.000	96,11	(171.282.000)	-3,89
2007	4.915.199.900	4.452.151.000	90,58	(463.048.900)	-9,42
2008	6.000.000.000	4.571.239.500	76,19	(1.428.760.500)	-23,81
2009	4.500.000.000	4.503.206.000	100,07	3.206.000	0,07
2010	4.800.000.000	4.553.160.000	94,86	(246.840.000)	-5,14

Sumber: UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung (tahun 2011)

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa dari lima tahun terakhir, hanya tahun 2009 saja yang melampaui target, sedangkan empat tahun lainnya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Misalkan pada tahun 2010 saja dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.800.000.000,00, hanya terealisasi Rp 4.553.160.000,00 saja, berarti terdapat Rp 246.840.000,00 yang tidak terealisasi. Pada tahun 2007 dari Rp4.915.199.900,00 yang ditargetkan, hanya tercapai Rp4.452.151.000,00 saja atau sebesar 90,58 %. Apalagi pada tahun 2008, terjadi penurunan, yaitu hanya dapat tercapai sebesar 76,19% atau Rp4.571.239.500,00 dari Rp6.000.000.000,00 yang ditargetkan.

Tidak hanya targetnya yang tidak dapat terealisasi, penetapan target retribusi parkir dari tahun 2008 ke tahun 2009 pun justru mengalami penurunan. Semakin sedikitnya jumlah lahan parkir disinyalir menjadi penyebab kecilnya pula penerimaan retribusi parkir.

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung nomor 551.22/Kep.1473-Huk/2003, pemerintah Kota Bandung pada tahun 2010, menguasai 227 titik lokasi parkir. dengan luas yang telah diberi maka parkir sebesar 4.256 meter persegi. Di lahan seluas itu, terdapat 1.850 juru parkir dan 44 mandor. Mereka berada di bawah pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dari banyaknya titik lokasi parkir di Kota Bandung tentu penerimaan retribusi parkir pun diharapkan melebihi target, namun pada kenyataannya, justru banyak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya pemungutan retribusi di Kota Bandung.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raden Dian Hardiana (2008) dengan judul “Analisis Potensi dan Efektivitas Retribusi Parkir pada Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Kota Bandung” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi retribusi parkir mencapai Rp6.691.070.398,04 dan efektivitas retribusi parkir berdasarkan potensinya sebesar 62,97% sehingga berada pada kriteria kurang efektif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, analisis efektivitas berdasarkan target. Periode yang digunakan adalah 2001-2010 untuk kontribusi dan efektivitas berdasarkan target, sedangkan potensi menggunakan periode 2010. Selain itu, untuk menghitung potensi menggunakan rumus Kesit yang dimodifikasi dengan menambahkan peluang parkir kendaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai seberapa besar efektivitas retribusi parkir dan seberapa besar pula kontribusinya terhadap PAD Kota Bandung. Adapun judul yang diangkat adalah **“ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi retribusi parkir di Kota Bandung
2. Bagaimana efektivitas retribusi parkir di Kota Bandung berdasarkan target
3. Bagaimana efektivitas retribusi parkir di Kota Bandung berdasarkan potensi
4. Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai retribusi parkir, menganalisis efektivitas retribusi parkir dan kontribusi dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. potensi retribusi parkir di Kota Bandung
2. efektivitas retribusi parkir di Kota Bandung berdasarkan target
3. efektivitas retribusi parkir di Kota Bandung berdasarkan potensi
4. kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Merujuk pada maksud dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberi sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan mengenai retribusi daerah, khususnya mengenai retribusi parkir.

2. Kegunaan praktis

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam hal retribusi parkir karena retribusi ini merupakan jenis retribusi yang memberikan kontribusi atau sumbangan penerimaan bagi pemerintah yang cukup besar. Penerimaan retribusi yang tidak mencapai target mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang harus segera dicari jalan keluarnya agar pemerintah tidak selalu dirugikan dari adanya berbagai kecurangan dalam masalah ini.

